

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Hutan Raya Balas Klumprik Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan melibatkan berbagai *stakeholder* yang terdiri atas pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), sektor swasta, perguruan tinggi, media massa, masyarakat, dan wisatawan. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kewenangan, tugas, dan bentuk keterlibatannya sehingga saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, dan daya tarik wisata edukasi. Berdasarkan teori peran *stakeholder* menurut Nugroho, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peran *stakeholder* sebagai *policy creator* dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya sebagai pengelola utama kawasan. DKPP berperan dalam menyusun kebijakan, menetapkan program kerja, serta menentukan arah pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan kawasan sekaligus menjadi dasar bagi *stakeholder* lain dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.
2. Peran *stakeholder* sebagai *coordinator* diwujudkan melalui koordinasi antara DKPP Kota Surabaya dengan beberapa organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman (DPRKP), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), serta Dinas Koperasi Kota Surabaya. Koordinasi tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi dalam mendukung penataan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan Sentra Wisata Kuliner sehingga pengelolaan kawasan dapat berjalan secara terpadu.

3. Peran *stakeholder* sebagai *facilitator* diwujudkan melalui penyediaan fasilitas oleh pengelola kawasan serta dukungan dari sektor swasta, yaitu ADIRA Finance dan PT Pos Indonesia melalui kegiatan penanaman pohon. Berbagai bentuk fasilitasi tersebut mendukung kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam memanfaatkan Hutan Raya Balas Klumprik sebagai kawasan wisata edukasi.
4. Peran *stakeholder* sebagai *implementer* dijalankan oleh pengelola kawasan, masyarakat, dan wisatawan. Pengelola melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan kawasan, masyarakat berpartisipasi melalui pengelolaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) serta menjaga kebersihan lingkungan, sedangkan wisatawan berkontribusi dengan memanfaatkan fasilitas secara bertanggung jawab, mematuhi tata tertib kawasan, dan memberikan masukan terhadap pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik.
5. Peran *stakeholder* sebagai *accelerator* diwujudkan melalui keterlibatan perguruan tinggi dan media massa. Perguruan tinggi berkontribusi melalui kegiatan penelitian dan program magang, sedangkan Jawa Pos berperan dalam mempublikasikan berbagai kegiatan dan potensi Hutan Raya Balas

Klumprik sehingga mendukung penyebaran informasi, fungsi edukasi, serta pengembangan kawasan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik telah menerapkan kolaborasi antar *stakeholder* sesuai dengan peran masing-masing sebagaimana dikemukakan dalam teori peran *stakeholder* menurut Nugroho, yaitu sebagai *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementer*, dan *accelerator*. Kolaborasi tersebut mendukung pengelolaan kawasan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, dan daya tarik wisata edukasi. Meskipun demikian, keterlibatan *stakeholder* dari sektor swasta, perguruan tinggi, dan media massa masih dapat terus ditingkatkan agar pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik menjadi lebih optimal, inovatif, dan berkelanjutan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *stakeholder* dalam pengelolaan daya tarik wisata Hutan Raya Balas Klumprik Surabaya, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya selaku pengelola utama Hutan Raya Balas Klumprik, disarankan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, baik organisasi perangkat daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, maupun media massa. Selain itu, pemeliharaan fasilitas kawasan perlu dilakukan secara

berkelanjutan agar kualitas sarana dan prasarana tetap terjaga sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung tanpa mengurangi fungsi utama kawasan sebagai hutan lindung.

2. Bagi *stakeholder* pendukung, seperti sektor swasta, perguruan tinggi, media massa, serta organisasi perangkat daerah terkait, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Sektor swasta dapat memperluas dukungan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, khususnya pada kegiatan konservasi dan pengembangan fasilitas pendukung. Perguruan tinggi diharapkan dapat terus memanfaatkan Hutan Raya Balas Klumprik sebagai lokasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun program magang, sedangkan media massa diharapkan dapat meningkatkan publikasi mengenai potensi, kegiatan, dan program konservasi sehingga informasi mengenai Hutan Raya Balas Klumprik dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik dengan menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda, seperti metode kuantitatif atau *mixed methods*, sehingga dapat memberikan sudut pandang yang lebih beragam. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji aspek lain, seperti efektivitas kolaborasi antar *stakeholder*, tingkat kepuasan wisatawan, strategi pengembangan daya tarik wisata, maupun dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengelolaan Hutan Raya Balas Klumprik sehingga dapat melengkapi hasil penelitian ini.